

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 144 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KERJA UNTUK ISU PENGADAAN PEMERINTAH DALAM KERANGKA  
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pembukaan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional, dipandang perlu membentuk Tim Kerja untuk Isu Pengadaan Pemerintah dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja untuk Isu Pengadaan Pemerintah dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Internasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA UNTUK ISU PENGADAAN PEMERINTAH DALAM KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja untuk Isu Pengadaan Pemerintah dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Internasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membahas dan merumuskan sektor barang, jasa, dan konstruksi Indonesia yang dapat dibuka dalam pembukaan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional;
- b. membahas dan merumuskan sektor barang, jasa, dan konstruksi Indonesia yang perlu untuk dilindungi dalam pembukaan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional;
- c. membahas dan merumuskan sektor barang, jasa, dan konstruksi dari negara mitra yang akan menjadi target pasar penyedia Indonesia dalam pembukaan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional;
- d. menganalisis dan merumuskan ambang batas setiap sektor pengadaan yang akan ditetapkan dalam perjanjian perdagangan internasional di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- e. menganalisis dan merumuskan ketentuan masa transisi pembukaan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perjanjian perdagangan internasional di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- f. membahas dan merumuskan substansi yang perlu dijadikan referensi dalam negosiasi perundingan perjanjian perdagangan internasional di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
- g. membahas dan merumuskan pilihan strategi dalam persiapan pembukaan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan asosiasi pelaku usaha, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KERJA UNTUK ISU  
PENGADAAN PEMERINTAH  
DALAM KERANGKA PERJANJIAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NOMOR : 144 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 JUNI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KERJA UNTUK ISU PENGADAAN PEMERINTAH DALAM KERANGKA  
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama Jabatan	Instansi
1	Ketua Tim Pengarah/ <i>Steering Committee</i>	: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Wakil Ketua Tim Pengarah/ <i>Steering Committee</i>	: Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3	Anggota Tim Pengarah/ <i>Steering Committee</i>	: 1. Sekretaris Jenderal 2. Sekretaris Jenderal 3. Sekretaris Jenderal 4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 5. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat 7. Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kesehatan Kementerian Perdagangan  Kementerian Luar Negeri  Kementerian Perhubungan  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Sekretariat Ketua	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan</li> <li>2. Kepala Biro Advokasi Perdagangan</li> <li>3. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara</li> <li>4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia</li> <li>5. Kepala Biro Umum</li> <li>6. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>7. Direktur Akses Industri Internasional</li> <li>8. Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi</li> <li>9. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi</li> <li>10. Kepala Subdirektorat Keuangan dan Industri Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi</li> <li>11. Analis Madya Kebijakan Suntrak Matrat Pusalpalhan Badan Sarana Pertahanan</li> </ol>	<p>Kementerian Kesehatan</p> <p>Kementerian Perdagangan</p> <p>Kementerian Perhubungan</p> <p>Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika</p> <p>Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Kementerian Perindustrian</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>Kementerian Luar Negeri</p> <p>Kementerian Pertahanan</p>
---	---------	---	---

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO